

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan	9
C. Pokok Permasalahan yang Dibahas	10
D. Susunan Personalia Tim	10
E. Pelaksanaan Kegiatan	11
BAB II POTRET SIFAT DAN CORAK KEBIJAKAN HUKUM (LEGAL POLICY) DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA	13
A. Pengertian Kebijakan Hukum Lingkungan dan Masalahnya	13
B. Potret Kebijakan Hukum Lingkungan	17
1. Sifat Perangkat Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	18
2. Corak Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	23
BAB III PENGATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL	27
A. Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Tingkat Nasional	27
1. Pengaturan Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Tingkat Nasional (Pusat)	28

2. Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Tingkat Daerah	36
B. Pengaturan Internasional Pengelolaan Lingkungan Hidup	38
1. Perjanjian (Internasional) Regional Bidang Lingkungan Hidup	40
a. Konvensi ASEAN tentang Pelestarian Alam dan Sumber Daya Alam (Kuala Lumpur-Malaysia, 9 Juli 1995)	40
b. Deklarasi ASEAN tentang Kawasan Lindung (Yangoon- Myanmar, 18 Desember 2003)	41
c. Resolusi Yangoon tentang Pembangunan Berkelanjutan (Yangoon, 18 Desember 2003)	41
d. Resolusi tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Singapore, 18 Februari 1992)	42
e. Resolusi Jakarta tentang Pembangunan yang Berkelanjutan (Jakarta, 30 Oktober 1987)	42
f. Deklarasi Bangkok tentang Lingkungan Hidup ASEAN (Bangkok, 29 November 1984)	42
2. Perjanjian (Global) Internasional Bidang Lingkungan Hidup	43
a. Kelompok Udara dan Atmosfir	43
1) <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> 1992 (UNFCCC)	43
2) <i>Kyoto Protocol to the UNFCCC</i> 1997	45

3) <i>Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer</i> 1985	48
4) <i>Montreal Protocol on Substance that Deplete the Ozone Layer</i> 1987	49
b. Kelompok Keanekaragaman Hayati	51
1) <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> 1992(UNCBD)	51
2) <i>Cartagena Protocol on Biosafety</i> 2000	53
3) <i>Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat</i> 1982 (RAMSAR)	55
4) <i>Convention of International Trade Endangered Species</i> 1977 (CITES)	57
5) <i>Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals</i> 1983 (CMS)	58
c. Kelompok Laut	60
1) <i>International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage</i> 1969 (CLC)	60
2) <i>Protocol of 1992 to amend International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC Prot)</i> .	62
3) <i>International Convention for the Prevention of Pollution from Ships</i> 1973 dan <i>Protocol 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ship</i> 1973 (MARPOL 1973/1978)	63

4)	<i>United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982</i>	66
5)	<i>Convention on the prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and other Matters 1972, as amended (London Dumping Convention)</i>	68
6)	<i>Protocol 1996 to The Convention on The Prevention of Marine Pollution By Dumping of Waste and other Matters (London Dumping Convention Protocol)</i>	70
7)	<i>Convention on Oil Pollution Preparedness Response and cooperation, 1990 (OPRC)</i>	71
d.	Kelompok Limbah Beracun, Bahan- Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya	73
1)	<i>Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous and their Disposal 1989</i>	73
2)	<i>The Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC/Rotterdam Convention)</i>	75
3)	<i>Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs Convention) 2001</i>	77
e.	Kelompok Penggurunan (Desertification) <i>United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, particularly in Africa 1994 (UNCCD)</i>	79

BAB IV	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	83
A.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ...	83
B.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan	86
1.	Kelembagaan Umum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan	86
2.	Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan	88
3.	Peran Arbiter, Mediator atau Pihak Ketiga Lainnya Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	91
4.	Proses Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan	92
5.	Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan	96
C.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan	107
1.	Gugatan Perdata	107
2.	Gugatan Tata Usaha Negara	130
BAB V	SUMBER DAYA MANUSIA	139
A.	Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi .	139
B.	Organisasi-Organisasi Lingkungan Hidup	142
1.	Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	142
2.	Fungsi-fungsi Organisasi Lingkungan Hidup	149

	3. Permasalahan	149
	4. Komitmen LSM Terhadap Lingkungan Hidup	151
	5. Kemitraan LSM Lingkungan Hidup	153
	6. Kecakapan dan Kewenangan LSM Lingkungan di Forum Pengadilan (<i>Legal Standing</i>)	155
BAB VI	PERAN PEMERINTAH DAN MASYARA- KAT DALAM PENGENDALIAN LING- KUNGAN (Studi kasus das Citarum dan Kawasan Jabodetabekpunjur)	159
	A. Pendahuluan	159
	B. Kondisi Kerusakan DAS Citarum dan Kawasan Jabodetabekpunjur	160
	C. Penyebab Krisis DAS Citarum dan Kawasan Jabodetabekpunjur	163
	D. Rekomendasi Langkah-Langkah Menuju Pelestarian DAS	172
	E. Sosialisasi Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Aparat Pemerintah dan Masyarakat...	184
	F. Penutup	188
BAB VII	PENUTUP	191
	A. Kesimpulan	191
	B. Saran Dan Rekomendasi	194
DAFTAR PUSTAKA		196